



ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT DALAM MENGAKTIFKAN KEMBALI KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Kadek Putra Devinda Pramuditya¹ Ni Putu Wiwin Setyari²

Article history:

Submitted: 17 Juli 2022

Revised: 30 Juli 2022

Accepted: 7 Agustus 2022

Keywords:

BPJS of Employment;
income;
dues;
level of education;
interest.

Kata Kunci:

BPJS Ketenagakerjaan;
pendapatan;
iuran;
tingkat pendidikan;
minat.

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Bali,
Indonesia

Email:
devindapramuditya24@gmail.com

Abstract

The purpose this study to determine partial and simultaneous effect income, contribution and education level variables on variable of public interest in re-activating BPJS Employment membership in Tabanan Regency. The sampling method used non-probability sampling using the Slovin formula and obtained a sample of 100 people who are inactive participants of BPJS Employment in Tabanan Regency. The way of collecting data is by using a questionnaire. The analysis technique used is the Logistics Regression test using an analytical tool to process the data by using SPSS. Based on the results of the study, it shows that income, the amount of contributions, and the level of education simultaneously have a positive effect on public interest in re-activating BPJS Employment membership in Tabanan Regency. Income, the amount of contributions, and the level of education partially have a positive effect on public interest in re-activating BPJS Employment membership in Tabanan Regency. It is hoped that the Tabanan Regency BPJS Employment will provide a deeper understanding of the importance of participating in the BPJS Employment program to the wider community in particular, as well as through the Employment Service to be more persuasive to the community by providing more information outreach.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan variabel pendapatan, iuran dan tingkat pendidikan terhadap variabel minat masyarakat dalam mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Tabanan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan menggunakan rumus Slovin dan diperoleh sampel sebanyak 100 orang yang merupakan peserta tidak aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Tabanan. Cara pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuisioner. Teknik Analisis yang digunakan adalah uji Regresi Logistik dengan menggunakan alat analisis untuk mengolah data yaitu dengan menggunakan SPSS. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan, besaran iuran, dan tingkat pendidikan secara simultan berpengaruh positif terhadap minat masyarakat untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Tabanan. Pendapatan, besaran iuran, dan tingkat pendidikan secara parsial berpengaruh positif terhadap minat masyarakat untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Tabanan. Diharapkan kepada BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tabanan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan pada masyarakat luas khususnya, serta melalui Dinas Ketenagakerjaan agar lebih persuasif terhadap masyarakat dengan lebih memberikan penyuluhan informasi.

PENDAHULUAN

Jaminan sosial bagi tenaga kerja sudah tertuang dalam aturan yang di buat oleh pemerintah yaitu Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pemerintah sangat mengapresiasi tenaga kerja yang ada di Indonesia dengan memberikan berupa jaminan sosial bagi mereka, yaitu dalam bentuk BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan akan di peroleh ketika mereka diterima menjadi pekerja (tenaga kerja) disuatu badan atau perusahaan serta lapangan kerja lainnya tanpa terkecuali. Banyaknya jaminan sosial bagi tenaga kerja yang diberikan oleh pemerintah bukan menjadi jaminan bagi tenaga kerja bisa menikmati, karena masih banyaknya perusahaan yang nakal atau tidak mematuhi aturan yang dibuat pemerintah dengan alasan tidak mau merugi membayar iuran jaminan sosial tersebut. Akibatnya para tenaga kerja hanya pasrah menerima keadaan mereka tersebut dengan alasan jika mereka menuntut akan diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan tersebut (Erlangga, 2019).

Bagi tenaga kerja, mereka sangat membutuhkan adanya jaminan sosial tersebut. Tujuan dari ikut BPJS Ketenagakerjaan adalah melindungi para pekerja dari berbagai kemungkinan yang terjadi di tempatnya bekerja. Sebagai contoh, salah satu peserta merupakan pekerja untuk pembangunan gedung tinggi, ada banyak resiko terkait pekerjaan yang mengakibatkan kecelakaan kerja dan bisa membuat pekerja tersebut cacat atau meninggal dunia. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada para pekerja dan memberikan teguran atau razia kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan tenaga kerjanya kedalam BPJS Ketenagakerjaan (Erlangga, 2019). Banyaknya pekerja yang tidak memiliki jaminan sosial menjadi perhatian serius bagi pemerintah sebagai badan yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan ini. Hanya itu yang mereka harapkan, apalagi tenaga kerja tersebut bekerja diperusahaan swasta yang notabene jaminan dihari tua mereka tidak ada dan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dengan tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan membuat mereka pasrah dengan keadaan mereka (Pangestika, dkk., 2017).

Sejauh ini BPJS Ketenagakerjaan sangat membantu dan menjadi pelindung bagi para tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja, Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Dengan adanya perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut mereka tidak perlu pusing lagi untuk memikirkan biaya pengobatan, karena semuanya sudah diurus oleh pemerintah dan perusahaan tempat mereka bekerja. Untuk itu sangat penting bagi tenaga kerja mendapatkan hak mereka dalam hal jaminan sosial ini (Pangestika, dkk., 2017). Di dalam BPJS Ketenagakerjaan sendiri terdapat 2 kelompok pekerja yaitu pekerja penerima upah dan pekerja bukan penerima upah. Peserta bukan penerima upah wajib mengikuti 2 (dua) program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dan dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua secara sukarela sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan hari Tua.

Pemerintah pada dasarnya telah memperhatikan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui program jaminan sosial. Namun dalam implementasinya masih banyak ditemukan kendala sehingga program jaminan sosial belum terlaksana secara optimal dan menyeluruh terutama bagi pekerja pada sektor informal seperti pedagang, nelayan, tukang ojek, tukang becak, dan lain sebagainya. Masih begitu banyak pekerja informal yang belum terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pekerja bukan penerima upah atau pekerja disektor informal sangat rentan terhadap risiko sakit dan kecelakaan kerja. Karena mereka umumnya bekerja kurang tertib atau

seringkali mengabaikan keselamatan kerja tanpa menggunakan pengaman kerja. Selain itu pekerja bukan penerima upah yang perekonomiannya menengah kebawah atau tidak mampu lebih memikirkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari (Erlangga, 2019).

Program BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Bali terbagi menjadi 2 yaitu Kepesertaan Aktif dan tidak aktif. Kepesertaan di kelompokkan menjadi 2 yaitu Tenaga Kerja Penerima Upah dan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah. Diketahui dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terjadi peningkatan untuk kepesertaan tenaga kerja penerima upah dari 347.500 orang menjadi 349.000 orang, kemudian untuk kepesertaan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah mengalami penurunan dari 122.707 orang menjadi 63.458 orang. Untuk total keseluruhan peserta baik penerima upah maupun bukan penerima upah mengalami penurunan dari 470.227 orang menjadi 412.875 orang. Selain itu juga diketahui kepesertaan tenaga kerja penerima upah yang tidak aktif mengalami penurunan dari 325.916 orang menjadi 317.147 orang, kemudian untuk kepesertaan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah tidak aktif mengalami penurunan dari 63.438 orang menjadi 8.876 orang. Selain itu, di ketahui bahwa cukup banyak peserta yang tidak aktif baik itu untuk peserta tenaga kerja penerima upah dan tenaga kerja bukan penerima upah. Untuk peserta tenaga kerja penerima upah yang tidak aktif sebesar 48,39% pada tahun 2020 dan sebesar 47,58% pada tahun 2021 sedangkan untuk peserta tenaga kerja bukan penerima upah yang tidak aktif sebesar 34,08% pada tahun 2020 dan sebesar 12,27% pada tahun 2021 (Satu data Indonesia, 2021).

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2010, angkatan kerja di Kabupaten Tabanan sebanyak 261.534 jiwa. Dari angkatan kerja yang ada 254.402 jiwa (97,27 %) diantaranya adalah penduduk yang bekerja, dan sisanya 7.132 (2,73 %) merupakan pengangguran terbuka. Penduduk angkatan kerja yang berada di Kabupaten Tabanan, penduduknya bekerja di sektor pertanian, yaitu sekitar 43,96 persen. Penduduk angkatan kerja yang bekerja di sektor perdagangan terdapat 44.250 jiwa (17,39 %), di sektor industri sebanyak 35.313 jiwa (13,88 %), dan sisanya tersebar di keenam sektor lainnya. Jumlah penduduk yang bukan angkatan kerja di Kabupaten Tabanan sebanyak 82.354 jiwa, di mana 19.249 jiwa (23,37 %) karena masih bersekolah, 48.697 jiwa (59,13 %) mengurus rumah tangga dan 14.408 (17,05 %) karena alasan lainnya. Seiring waktu jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Tabanan mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 sebanyak 270.736, kemudian tahun 2020 turun menjadi 265.435, dan pada tahun 2021 (September) turun kembali menjadi 260.155. Hal tersebut dikarenakan kondisi pandemi covid yang melanda seluruh dunia khususnya Indonesia. Apalagi Provinsi Bali yang merupakan daerah tujuan wisata baik domestik maupun luar negeri akan sangat terkenda dampak dari adanya virus Covid 19, termasuk juga di wilayah Kabupaten Tabanan (Badan Pusat Sstatistik Provinsi Bali, 2021).

Penurunan jumlah penduduk yang bekerja juga berpengaruh secara langsung terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari data yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan, Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Tabanan masih sangat sedikit jika dibandingkan jumlah penduduk yang bekerja di Tabanan. Pada tahun 2020 sebanyak 18.192 orang dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 17.596 orang. Sedangkan untuk tenaga kerja bukan penerima upah yang mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020 sebanyak 5.737 orang dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2.656 orang. Untuk total keseluruhan peserta baik penerima upah maupun bukan penerima upah yang aktif mengalami penurunan dari 23.929 orang menjadi 20.252 orang. Selain itu juga diketahui kepesertaan tenaga kerja penerima upah yang tidak aktif mengalami penurunan dari 7.746 orang pada tahun 2020 menjadi 4.415 orang pada tahun 2021, kemudian untuk kepesertaan Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah tidak aktif mengalami penurunan dari 246 orang pada tahun 2020 menjadi 189 orang pada tahun 2021 (BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tabanan, 2021).

Ada banyak faktor yang menyebabkan pekerja bukan penerima upah maupun pekerja penerima upah tidak berminat ikut program BPJS Ketenagakerjaan maupun mengaktifkan kembali kepesertaannya, meskipun hal tersebut diwajibkan oleh Undang Undang. Salah satu faktor penyebabnya adalah Pendapatan Masyarakat. Di kondisi pandemi covid yang mulai merebak di awal tahun 2020 membuat Pendapatan masyarakat turun khususnya di Tabanan dan Indonesia pada umumnya. Ketika Pendapatan masyarakat menurun secara otomatis jumlah Partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan terhadap program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Tabanan akan menurun. Mereka akan lebih fokus terhadap pemenuhan kebutuhan sehari hari mereka dibandingkan harus mengeluarkan uang untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tabanan, 2021).

Selain faktor Pendapatan, hal lain yang mempengaruhi rendahnya minat atau partisipasi masyarakat adalah besaran iuran atau tarif yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tarif yang ditetapkan relatif cukup memberatkan bagi para peserta apalagi di saat kondisi pandemi covid pada awal tahun 2020. Selain kedua faktor tersebut, ada faktor lainnya yaitu tingkat pendidikan. Untuk di ketahui tingkat pendidikan di Kabupaten Tabanan sudah cukup baik, dimana tingkat pendidikan paling banyak adalah lulusan SMA dengan presentase sebesar 29,96 persen pada tahun 2020. Hanya saja sebagian besar (di atas 50%) hanya berpendidikan SMP ke bawah. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan paling banyak adalah Ijazah SMA kemudian diikuti Ijazah SD, SMP, Tidak Punya Ijazah, Ijazah D IV – S3, dan terakhir Ijazah DI – DIII. Selama 3 tahun yaitu 2018 – 2020 tren Ijazah meningkat semua kecuali untuk yang tidak punya ijazah dan ijazah DI – DIII menurun dan Ijazah SMP Fluktuatif (naik dan turun). Sehingga hal ini menyebabkan menurunnya minat dan kesadaran masyarakat untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tabanan, 2021).

Hipotesis dalam penelitian ini adalah Pendapatan (X1), Besaran iuran (X2) dan Tingkat Pendidikan (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Tabanan (Y). Pendapatan (X1), Besaran iuran (X2) dan Tingkat Pendidikan (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat dalam mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Tabanan (Y).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendapatan, besaran iuran dan tingkat pendidikan terhadap Minat Masyarakat dalam mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Tabanan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tabanan dengan pertimbangan bahwa masih banyak masyarakat yang sudah ikut dan tidak aktif dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Padahal pada era saat ini resiko kecelakaan kerja sangat tinggi maka dari itu partisipasi dalam program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sangat penting karena mengingat risiko-risiko kecelakaan kerja semakin banyak dan tidak dapat dipastikan kapan akan datang. Objek dalam penelitian ini adalah Minat Masyarakat dalam Mengaktifkan Kembali Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Tabanan (Y), Pendapatan Masyarakat (X1), Besaran Iuran (X2), Tingkat Pendidikan (X3). Sampel dalam penelitian ini sejumlah 100 orang dengan metode penentuan sample yang digunakan adalah *non probability sampling*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kuesioner. Adapun persamaan dari regresi logistik yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = minat masyarakat dalam mengaktifkan kembali Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
 α = konstanta
 β_1 - β_3 = koefisien variabel bebas
 x_1 = Pendapatan
 x_2 = Besaran Iuran
 x_3 = Tingkat Pendidikan
 ε = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil olah data regresi logistik dapat dilihat pada tabel 1. Dari tabel tersebut diketahui Persamaan regresi logistik biner yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$\hat{g}(x) = -3,352 + 0,774 X_1 + 1,210 X_2 + 0,643 X_3$$

Keterangan:

- X_1 : Variabel Pendapatan
 X_2 : Variabel Iuran
 X_3 : Variabel Pendidikan
Y : Variabel Minat Aktif Kembali

Tabel 1.
Hasil Analisis Regresi Logistik

| | | B | S.E. | Wald | df | Sig. |
|---------------------------|--------------------|--------|------|--------|----|------|
| Step 1^a | Pendapatan | .774 | .367 | 4.434 | 1 | .035 |
| | Iuran | 1.210 | .493 | 6.018 | 1 | .014 |
| | Tingkat Pendidikan | .643 | .313 | 4.230 | 1 | .040 |
| | Constant | -3.352 | .833 | 16.192 | 1 | .000 |

a. Variable(s) entered on step 1: Pendapatan, Iuran, Tingkat Pendidikan

Sumber : Data diolah SPSS (2022)

$$\text{Probabilitas} = \frac{\exp(-3,352 + 0,774 X_1 + 1,210 X_2 + 0,643 X_3)}{1 + \exp(-3,352 + 0,774 X_1 + 1,210 X_2 + 0,643 X_3)}$$

Dari Tabel 1 diketahui bahwa misalkan sampel yang berpendapatan tinggi, memiliki iuran yang lebih tinggi dan berpendidikan tinggi, maka pendapatan tinggi =1, dan iuran tinggi = 1. serta berpendidikan tinggi = 1. Jika dimasukkan ke dalam model persamaan di atas, maka sebagai berikut:

$$\text{Probabilitas atau Predicted} = \frac{\exp(-3,352 + (0,774 \times 1) + (1,210 \times 1) + (0,643 \times 1))}{1 + \exp(-3,352 + (0,774 \times 1) + (1,210 \times 1) + (0,643 \times 1))}$$

$$\text{Probabilitas atau Predicted} = \frac{\exp(-3,352 + (0,774) + (1,210) + (0,643))}{1 + \exp(-3,352 + (0,774) + (1,210) + (0,643))}$$

$$\text{Probabilitas atau Predicted} = -0,725 / 0,275$$

$$\text{Probabilitas atau Predicted} = -2,63$$

Oleh karena $Predicted: -2,63 < 0,5$ maka nilai $Predicted Group Membership$ dari sampel di atas adalah 1. Di mana 1 adalah kode berminat untuk aktif kembali. Jadi jika sampel berpendapatan tinggi (kode 1), memiliki iuran yang tinggi (kode 1) dan berpendidikan tinggi (kode 1) maka prediksinya adalah berminat untuk aktif kembali (kode 1). Jika seandainya sampel yang bersangkutan ternyata faktanya tidak berminat untuk aktif kembali mengikuti BPJS Ketenagakerjaan (kode 0) maka sampel tersebut keluar dari nilai prediksi.

Besarnya perbedaan atau yang disebut dengan $Residual = Predicted Group Membership - Predicted$. Pada kasus di atas di mana orang yang berpendapatan tinggi, memiliki iuran yang tinggi dan berpendidikan tinggi namun faktanya tidak berminat untuk aktif kembali keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan, maka $Residual = 0 + 2,63 = 2,63$.

Teori oleh Wiseman (2018) mengemukakan bahwa pendapatan masyarakat mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam berasuransi. Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam berasuransi. Peserta dengan tingkat Pendapatan tinggi, 2,168 kali lebih berminat mengaktifkan Kembali Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dibandingkan peserta yang tingkat pendapatan yang lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh karena dengan pendapatan mereka yang tinggi, mereka merasa mampu untuk membayar iuran BPJS ketenagakerjaan. Selain itu, responden menyadari bahwa keselamatan kerja adalah salah satu bagian yang sangat penting dan menunjang kehidupan sehingga harus dijaga.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji regresi logistik diperoleh nilai signifikansi uji Wald sebesar 0,035 kurang dari 0,05 sehingga H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Tabanan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pangestika, dkk., (2017) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara penghasilan dengan keikutsertaan kepala keluarga dalam jaminan kesehatan nasional ($p=0,027$). Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016) yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh pendapatan terhadap kepesertaan BPJS Mandiri. Dimana berdasarkan hasil uji Chi Square yang dilakukan diperoleh nilai $p = 0,685$ ($p > 0,05$). Pendapatan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap keikutsertaan masyarakat dalam BPJS Ketenagakerjaan. Pendapatan masyarakat yang tinggi akan meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat untuk memiliki asuransi keselamatan kerja.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji regresi logistik diperoleh nilai signifikansi uji Wald sebesar 0,014 kurang dari 0,05 sehingga H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa besaran iuran berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Tabanan. Peserta dengan tingkat iuran tinggi, memiliki kecenderungan untuk berminat mengaktifkan Kembali Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 3,352 kali dibandingkan Peserta dengan tingkat iuran rendah. Hasil serupa ditemukan pada penelitian (Erlangga, 2019). Dalam penelitiannya menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara pembiayaan dengan kepesertaan sektor informal dalam BPJS Kesehatan Mandiri ($p = 0,000$). Masyarakat Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan yang beranggapan bahwa biaya BPJS Kesehatan memberatkan, kemungkinan cenderung mempunyai pendapatan dalam keluarga yang tidak menentu, sehingga takut jika tiba jatuh tempo pembayaran iuran, mereka tidak bisa membayar tepat waktu. Mereka beranggapan meskipun kelas kepesertaan BPJS Kesehatan yang akan dipilih adalah yang terendah, yaitu kelas III, akan tetapi tetap saja jika memiliki anggota keluarga yang cukup banyak, maka biaya yang akan dibayarkan juga menjadi bertambah banyak. Hal itulah yang menyebabkan mereka sebenarnya berminat menjadi peserta BPJS Kesehatan tetapi berat dalam biaya iuran BPJS Kesehatan.

Hal tersebut sesuai dengan teori Fatah (2006) yang mengatakan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat desa akan menentukan tingkat partisipasinya dalam pembangunan, sehingga dapat

disimpulkan masyarakat dengan tingkat ekonomi yang tinggi maka partisipasinya tinggi, sedangkan masyarakat dengan tingkat kemampuan ekonomi yang rendah partisipasinya juga rendah. Oleh karena itu tidak ada kesenjangan antara teori dengan hasil temuan di lapangan. Pendidikan adalah salah satu bagian dari struktur sosial yang digunakan untuk menggambarkan fakta bahwa setiap individu mempunyai kecenderungan untuk menggunakan pelayanan asuransi baik kesehatan maupun keselamatan kerja. Faktor pendidikan merupakan faktor yang secara tidak langsung turut serta mempengaruhi kondisi sosial ekonomi keluarga sehingga juga akan mempengaruhi keluarga dalam pemanfaatan pelayanan asuransi kesehatan maupun keselamatan kerja. Seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi maka akan memiliki pemikiran yang lebih baik dalam mengolah informasi sehingga dapat mempengaruhi pengetahuannya dalam suatu hal, termasuk dalam pemanfaatan pelayanan asuransi kesehatan maupun keselamatan (Girma, 2011).

Peserta dengan tingkat pendidikan tinggi, 1,902 kali lebih berminat mengaktifkan Kembali Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dibandingkan peserta dengan tingkat pendidikan rendah. Hal ini menunjukkan semakin peserta memiliki pendidikan yang tinggi maka pemahaman akan pentingnya ikut serta BPJS Ketenagakerjaan juga semakin tinggi. Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji regresi logistik diperoleh nilai signifikansi uji Wald sebesar 0,040 kurang dari 0,05 sehingga H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Tabanan. Tingkat pendidikan memegang peran penting akan tingginya kesadaran seseorang untuk ikut berasuransi, karena melalui pendidikan formal wajib belajar 9 tahun, ditambah dengan sekolah tingkat menengah ke atas dan perguruan tinggi. Maka dengan begitu akan mampu mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam melakukan proses pendewasaan yang terus meningkat, sehingga melalui tingkat pendidikan yang tinggi dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan sebuah tindakan perencanaan dan pengendalian untuk mengatasi risiko yang tidak pasti pada masa depan yang timbul dalam kehidupan. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi juga pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang asuransi, sehingga mampu menimbulkan tingkat kesadaran yang tinggi dalam berasuransi baik kesehatan maupun ketenagakerjaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Masyarakat dalam Mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Di Kabupaten Tabanan, Artinya Semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam berasuransi. Iuran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Masyarakat dalam Mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Di Kabupaten Tabanan, Artinya peserta dengan tingkat iuran tinggi memiliki kecenderungan untuk berminat mengaktifkan Kembali Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya. Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Masyarakat dalam Mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Di Kabupaten Tabanan, artinya semakin peserta memiliki pendidikan yang tinggi maka pemahaman akan pentingnya ikut serta BPJS Ketenagakerjaan juga akan semakin tinggi. Pendapatan, Besaran iuran dan Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Masyarakat dalam Mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Di Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang dipaparkan, maka peneliti mengajukan beberapa saran, yaitu 1) diharapkan kepada BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tabanan untuk memberikan

pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan pada masyarakat luas khususnya. Selain itu, bagi peserta yang sudah tidak aktif dan membangun pandangan yang lebih baik di mata masyarakat seperti meningkatkan kualitas program sehingga dapat meningkatkan sikap positif masyarakat tentang BPJS Ketenagakerjaan. Serta melaksanakan sosialisasi dan menekankan persepsi manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan secara menyeluruh kepada masyarakat maupun kepada perusahaan sehingga masyarakat maupun perusahaan mendapatkan informasi yang pasti akan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan; 2) diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Ketenagakerjaan agar lebih persuasif terhadap masyarakat dengan lebih memberikan penyuluhan informasi tentang pentingnya keselamatan kerja dan menjaga risiko kecelakaan kerja yang tak terduga dimasa depan dengan mengikuti program asuransi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjamin keselamatan kerja di masa yang akan datang.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2021). *Penduduk yang bekerja di Kabupaten Tabanan*. BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tabanan. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Keikutsertaan terhadap Program BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tabanan Tahun 2020 - September 2021*.
- Dewi, D. K. R. (2016). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 4, 1–10.
- Erlangga, Darius, et al. (2019). The impact of public health insurance on health care utilisation, financial protection and health status in low-and middle-income countries: A systematic review. *PloS One*, 14(8).
- Fatah, L. (2006). *Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Pustaka Banua.
- Girma, F.C Jira., et. a. (2011). Health Services Utilization and Associated Factors In JimmaZone, South West Ethiopia. *Jurnal: Health Services Utilization and Associated*, 21.
- Indonesia, S. data. (2021). *Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Bali Tahun 2020 – 2021*.
- Pangestika, V. F., Jati, S. P., & Sriatmi, A. (2017). Faktor–faktor yang berhubungan dengan kepesertaan sektor informal dalam BPJS kesehatan mandiri di Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 5(3), 39–48.
- Wiseman, et all. (2018). An evaluation of health systems equity in Indonesia: study protocol. *International Journal for Equity in Health*, 17, 138.